

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN
2013-2017**

SKRIPSI



**Oleh :
Sri Septiana
150810276**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN
2013-2017**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi**



**Oleh :
Sri Septiana
150810276**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : **Sri Septiana**
NPM : 150810276
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “ **Skripsi**” yang saya buat dengan judul :

”Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Batam Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013-2017”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 08 Februari 2019

Sri Septiana
150810276

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN
2013-2017**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Sri Septiana
150810276**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 08 Februari 2019

Baru Harahap, S.E., M.Ak.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2013-2017 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Batam. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang sangat tinggi dengan pola delegatif, rasio efektivitas kinerja keuangan kota batam sudah efektif karena efektivitas rata-rata di atas 100%, yaitu 103,27%. rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Batam adalah 487,57%, rasio aktivitas diketahui bahwa rata-rata pengeluaran operasional daerah masih sangat tinggi yaitu 53,92% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 46,08% sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah masih belum memperhatikan pembangunan daerah. rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja operasi, dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang positif.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the Financial Performance of the Batam City Dinas Perhubungan in 2013-2017 seen from the regional financial independence ratio, the effectiveness ratio of PAD, regional financial efficiency ratio, activity ratio and growth ratio. This research is quantitative descriptive. This research was conducted at the Batam City Dinas Perubungan. Data collection using the documentation method. The data analysis technique used is descriptive quantitative with the formula: Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Activity Ratio and Growth Ratio. The results showed that in general the financial performance of the Batam City Dinas Perhubungan was good. This is indicated by the very high average financial independence of the region with a delegative pattern, the effectiveness ratio of batam city financial performance has been effective because the effectiveness of the average is above 100%, which is 103.27%. regional financial efficiency ratio can be said to be inefficient because the average regional financial efficiency of Batam City is 487.57%, the activity ratio is known that the average regional operational expenditure is still very high at 53.92% compared to the average capital expenditure of 46, 08% so that it can be said that the Regional Government still does not pay attention to regional development. the ratio of regional income growth, income growth ratio, operating expenditure growth ratio, and capital expenditure growth ratio experienced positive growth.

Keywords *Local Government Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio and Growth Ratio.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam..
4. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Bapak Syarif Hidayah Lubis, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, memberikan semangat, dan doa yang tidak pernah terputus. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dan menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Ayah dan Ibu.
8. Saudara dan Teman seangkatan. Sang pengkritisi hidup dan penasihat kebaikan untuk masa depan yang selalu membimbing penulis menuju jalan yang benar dan selalu bersama menghabiskan waktu baik suka maupun duka.
9. Para pejuang skripsi, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya selama di bangku kuliah. Sukses untuk kita semua.

10. Seluruh sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung.

Semoga Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 08 Februari 2019

Sri Septiana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Teoritis	10
2.1.1 Pengetian Laporan Keuangan	10
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan	11
2.1.3 Fungsi Laporan Keuangan	11
2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan	12
2.1.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan	12
2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan	13
2.1.7 Analisis Laporan Keuangan	15
2.1.8 Rasio Keuangan	15
2.1.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
2.1.10 Tujuan Kinerja Keuangan	17
2.1.11 Analisis Rasio Keuangan Daerah	18
2.1.12 Manfaat Rasio Keuangan Daerah.....	19
2.1.13 Jenis Rasio Keuangan Daerah.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.4 Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Tahapan Penelitian	28
3.2 Operasional Variabel.....	30

3.3	Populasi dan Sampel	32
3.3.1	Populasi	32
3.3.2	Sampel.....	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5	Metode Analisis Data.....	33
3.6	Jadwal Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Gambaran Objek Penelitian	35
4.1.2	Data Khusus	35
4.1.3	Analisis Data	36
4.2	Pembahasan.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	22
Tabel 2.3	Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	22
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Rasio Keuangan	34
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Laporan APBD Dishub Kota Batam Tahun 2013-2017.....	37
Tabel 4.2	Realisasi APBD Dishub Kota Batam Tahun 2013-2017	38
Tabel 4.3	Rasio Kemandirian.....	38
Tabel 4.4	Rasio Efektivitas	38
Tabel 4.5	Rasio Efisiensi.....	39
Tabel 4.6	Rasio Belanja Rutin.....	40
Tabel 4.7	Rasio Belanja Modal	41
Tabel 4.8	Rasio Pertumbuhan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
-------------------------------------	----

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Rumus Rasio Kemandirian	20
Rumus 2.2 Rumus Rasio Efektivitas PAD.....	21
Rumus 2.3 Rumus Rasio Belanja Rutin dan Pembangunan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi terbentuk berdasarkan kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan partisipasi maksudnya mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang tidak menyalurkan aspirasi nya.

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri,

merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio laporan keuangan. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

Pentingnya dalam menganalisis suatu laporan keuangan secara menyeluruh untuk menilai perbandingan saldo-saldo yang dipandang berkaitan, yang dapat mencerminkan posisi keuangan suatu instansi serta kinerja keuangan tersebut seperti bagaimana likuiditas keuangan, kemampuan instansi dalam melunasi utang serta kemampuan untuk menghasilkan laba dan hal lainnya, baik itu merupakan suatu kemajuan ataupun suatu kemunduran. Perbandingan inilah yang lebih dikenal dengan istilah rasio. Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan data dari tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan.

Disamping itu, bukan rahasia lagi bahwa suatu instansi di Negara berkembang menggunakan utang sebagai penggerak kinerja keuangannya. Namun

penggunaan utang ini juga dapat menjadi bumerang bagi instansi itu sendiri karena disatu sisi penggunaan utang ini dapat memacu kinerja perusahaan, tetapi disisi lain hal ini dapat menjerumuskan suatu instansi dalam belenggu lilitan utang atau dalam mengalami kondisi kesulitan finansial (*financial distress*) dan bahkan juga dapat mengalami kebangkrutan jika utang tersebut tidak dikelola dengan benar. Dari beberapa analisis rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan diantaranya adalah analisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Analisis rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya, sedangkan rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. (Mamduh, 2009).

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan perhubungan baik darat, laut maupun udara di Prrovinsi Kepulauan Riau. Secara garis besar, fungsi strategis yang dijalankan adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang Perhubungan. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*realible*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan (Ropa, 2016)

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya *desentralisasi* sistem pemerintahan pada Kota Batam, karena itu Pemerintah Kota Batam sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Batam berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya

pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Batam, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Batam adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis kinerja keuangan pada dinas perhubungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2013-2017.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan

dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

4. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio dilakukan untuk melihat adakah kecenderungan yang terjadi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini agar dapat lebih fokus dalam melakukan penelitiannya. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah tujuan serta dapat diketahui sejauh mana penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Laporan keuangan APBD yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Batam di Provinsi Kepri tahun 2013-2017.
2. Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
3. Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2013 - 2017

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Aktivitas atau keserasian ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Aktivitas atau keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi Dinas Perhubungan Kota Batam dalam proses menilai kinerja pada aspek keuangan.
2. Sebagai evaluasi dan bentuk perbandingan dengan sistem yang selama ini dijalankan pemerintahan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada terutama ilmu analisis kinerja keuangan suatu instansi.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Belajar untuk meneliti, menguji, dan/atau mengobservasi fenomena dan permasalahan yang terjadi.
2. Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi penulis.
3. Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur di akuntansi dan juga dapat memperkaya pengembangan ilmu dalam bidang keuangan.
4. Menjadi sarana perwujudan latihan akademik dan pendalaman ilmu sekaligus pemahaman penulis, sebagai hasil proses pembelajaran penulis hingga saat ini, serta tentunya menjadi stimulus bagi penulis untuk lebih banyak belajar.

5. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin memperdalam pengetahuan dan ingin melakukan evaluasi lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengetian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan adanya keinginan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila dianalisis lebih lanjut, sehingga diperoleh informasi yang dapat mendukung kebijakan yang diambil (Kasmir, 2008:7).

Menurut (Susilo, 2009:10) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.3 Fungsi Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012 : 23) menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012:6) keterbatasan laporan keuangan adalah :

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bksn kepada sifat formalnya.

2.1.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan terdiri dari:

1. Neraca, menurut (Kasmir, 2014:28) neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, menurut (Kasmir, 2014:28) adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas, menurut (Dwi Martani, 2012:126) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang lengkap yang harus disajikan oleh suatu perusahaan.
4. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan suatu informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar serta setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dapat dibutuhkan para pemakai ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan baginya.

Menurut (Harahap, 2011) para pemakai laporan keuangan beserta kegunaannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemegang saham

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, asset, hutang, modal, hasil, biaya, dan laba. Pemegang saham ingin melihat prestasi perusahaan dalam pengolahan manajemen yang diberikan amanah. Ingin mengetahui jumlah deviden yang diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan, dan ingin mengetahui jumlah perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan usaha sejenis.

2. Manajer

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya.

3. Karyawan dan serikat pekerja

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia masih harus bekerja apakah pindah dan untuk bias menilai apakah penghasilan yang diterima adil apa tidak.

4. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi

Pemerintah ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang ditetapkan.

5. Lembaga swadaya masyarakat

Lemabaga swadaya masyarakat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindungi.

6. Peneliti atau akademisi

Bagi peneliti atau akademisi laporan keuangan sangat penting. Sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

2.1.7 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagianbagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2011:190).

Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai.

2.1.8 Rasio Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012:104) menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

2.1.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2.1.10 Tujuan Kinerja Keuangan

Praytino (2010 : 9) menyatakan tujuan penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya ingin mengetahui kinerja keuangan perusahaan, dimana dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan perusahaan terdapat indikator dari kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Mardiasmo, 2008) pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.11 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh

dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015:162).

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2010:88). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu dekade dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2012:4),.

Jadi dapat disimpulkan analisis rasio keuangan daerah adalah suatu proses membandingkan angka-angka yang terdapat didalam laporan keuangan, angka-angka tersebut dibandingkan dapat dari satu periode atau beberapa periode, tujuan analisis ini untuk mengetahui tingkat kinerja atau hasil yang dicapai selama periode yang dianalisis.

2.1.12 Manfaat Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD ini sangat berguna bagi beberapa pihak, adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan APBD ini menurut Faud (2016:138), adalah sebagai berikut :

1. DPRD; sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif; sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi; sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur; pihak yang bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.13 Jenis Rasio Keuangan Daerah

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti perlu alat yang digunakan untuk analisis, salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi adalah menggunakan rasio keuangan. Berikut ini merupakan beberapa rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam APBD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Halim, 2012).. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data *ekstern*). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Thoha (dalam Latuny:2016)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014:191).

Kriteria untuk mengetahui nilai efektivitas pajak daerah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas	Efektivitas Pajak Daerah
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup efektif
75% – 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

3. Rasio Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah (Mahsun, 2014: 189). Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi	Efisiensi Pajak Daerah
>100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 89%	Cukup Efisien
60% – 79	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007:234)

4. Rasio Aktivitas atau Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2010:162).

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012). Rasio pertumbuhan ini dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

a. Rasio pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan kecenderungannya (trend) meningkat.

b. Rasio pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

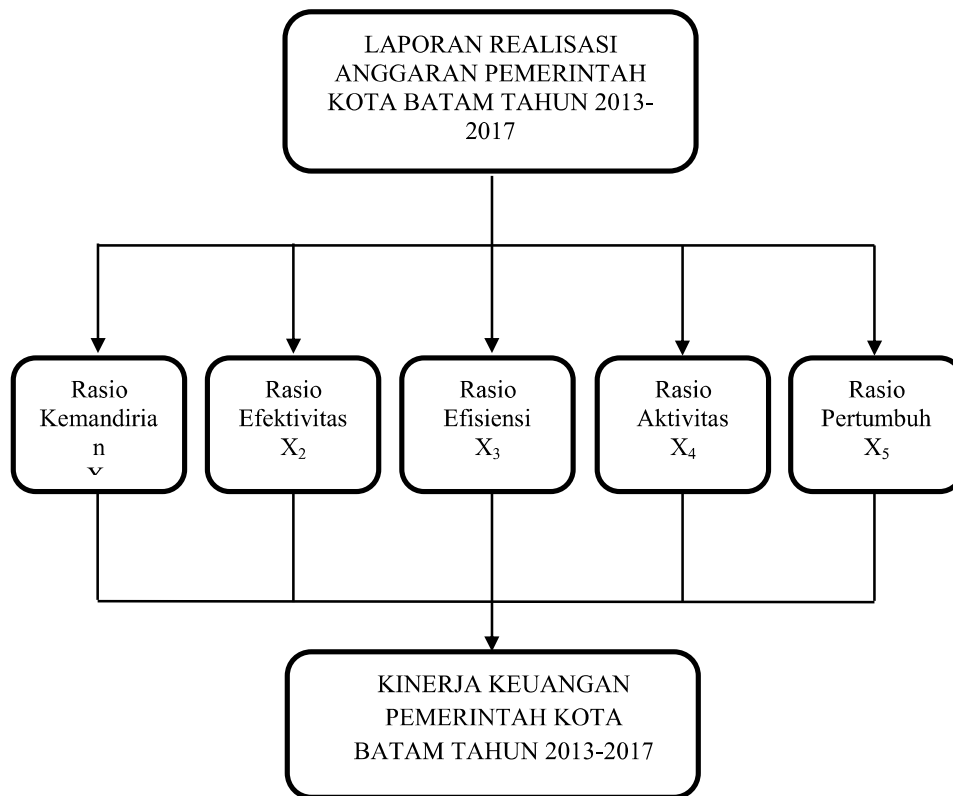
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kontadengan (2012)	Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada PT. Tri Setia Jujur Bersama Manado	Tingkat kinerja PR. Setia Tri Jujur Bersama Manado ditahun 2008 adalah baik, sedangkan pada tahun 2009 adalah cukup baik dan tahun 2010 adalah sangat baik.
2	Meycich (2009)	Analisis kinerja keuangan untuk mengukur kinerja keangan melalui penilaian tingkat likuiditas, dan solvabilitas.	Berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik
3	handayani (2011)	Analisis kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2006, kinerja keuangan perusahaan yang dinilai paling baik adalah PT Ricky Putra globalindo Tbk. Untuk tahun 2007 dan 2008 yang memiliki kinerja paling baik adalah PT <i>Polychen</i> Indonesia Tbk.
4	Praytino(2010)	Peranan analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan(studi kasus pada PT.X)	Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan ketidakseimbangan antara pennisapatan dan biaya serta pengeluaran keuangan hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi pasa pos pos lab rugi mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya, dan diimbangi oleh naiknya biaya produksi, untuk laba bersih sebelum pajak mengalami penurunan dari tahun 2 ketahun 1, sedangkan untuk tahun 3 terjadi kenaikan

			dibandingkan sebelumnya.	dengan	tahun
--	--	--	-----------------------------	--------	-------

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan pada Dinas Lperhubungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 sampai 2017 (sudi empris pada dinas lperhubungan kota batam).



2.4 Hipotesis

Menurut Sanusi (2011: 44) dalam (Nariana, Siti Khairani, 2011), hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis

adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Kemandirian tergolong tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif..
2. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Efektivitas PAD berjalan efektif.
3. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong efisien.
4. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Aktivitas atau keserasian berjalan stabil.
5. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses berupa langkah-langkah yang sudah direncanakan secara sistematis untuk memecahkan masalah atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. (Husein, 2014) Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses penelitian terdiri dari Sembilan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: mendefinisikan dan merumuskan masalah, melakukan studi kepustakaan, memformulasikan hipotesis, menentukan model, mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan informasi, menganalisis dan menginterpretasi, membuat generalisasi kesimpulan dan rekomendasi (saran), membuat laporan (Suryabrata, 2010).

Berdasarkan proses penelitian yang dijelaskan di atas yang terdiri dari 9 langkah maka penulis menjelaskan tahapan dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah

Langkah awal penulis mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, setelah itu memilih dan merumuskan yang tertuang dalam rumusan masalah.

2. Melakukan studi kepustakaan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka pada proses ini peneliti mempelajari teori dari buku-buku atau dari penelitian terdahulu, agar didapatkan landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Memformulasikan hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari perumusan masalah yang sudah ditentukan. Hipotesis sangat berguna bagi peneliti untuk menentukan hasil penelitian yang relevan.

4. Menentukan model

Model penelitian ini adalah pengaruh penghargaan finansial (X_1), pertimbangan pasar kerja (X_2) dan minat untuk berkarir sebagai akuntan publik (Y). sehingga dengan adanya model tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh hubungan antara variabel.

5. Mengumpulkan data

Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ini, agar dapat mengetahui masalah yang ingin diketahui dalam penelitian terjawab. Maka diperlukan metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan masalah yang ada penelitian.

6. Mengolah dan menyajikan informasi

Data yang sudah diolah dikumpulkan agar dapat menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

7. Menganalisis dan menginterpretasi

Hasil dari pengolahan data diatas selanjutnya dianalisis dengan metode uji data, metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kuantitatif yang sesuai dengan jenis penelitian ini.

8. Membuat generalisasi (kesimpulan) dan rekomendasi (saran)

Kesimpulan berupa jawaban dari perumusan masalah dan hipotesis yang telah dibuat. Selain itu saran perlu dibuat agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

9. Membuat laporan

Bagian terakhir dalam penelitian ini adalah membuat laporan penelitian yang berupa skripsi. Laporan penelitian harus ditulis dengan teknik penulisan yang benar, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

Berdasarkan variabel yang diteliti yaitu analisis kinerja keuangan pada dinas perhubungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2013-2017, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan variabel yang digunakan guna keperluan penelitian. Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa batasan dan pengertian dasar atau konsep operasional dan variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, penggunaan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang

diperlukan daerah. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

2. Rasio Efektivitas

Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

3. Rasio Efisiensi

Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Target Penerimaan}}$$

4. Rasio Aktivitas

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah

daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Rutin} &= \frac{\text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \\ \text{Rasio Belanja Pembangunan} &= \frac{\text{Total belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \end{aligned}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t-1}{\text{PAD tahun } t-1}$$

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi objek penelitian. Populasi ditentukan oleh peneliti berdasarkan karakteristik tertentu. Peneliti mempelajari karakteristik populasi setelah itu menarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahun berlaku SAP yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu pada tahun 2013 – 2017 (Sugiyono, 2014).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen catatan akuntansi serta data lain yang berhubungan dengan laporan keuangan dari tahun 2013 sampai 2017 pada Dinas Perhubungan Kota Batam (Sugiyono, 2014).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan penelitian langsung dari sumber utamanya. Adapun teknik Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*. Melalui wawancara ini pula peneliti mendapatkan informasi secara jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan dokumentasi serta data lainnya dalam perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dan laporan realisasi tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini teknik analisis rasio keuangan yang digunakan adalah :

Tabel 3.1 Rasio Keuangan

No	Rasio	Rumus
1	Rasio kemandirian	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$
2	Rasio efektivitas	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$
3	Rasio efisiensi	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Target Penerimaan}}$
4	Rasio aktivitas	$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$
5	Rasio pertumbuhan	$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t-1}{\text{PAD tahun } t-1}$

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diadakan bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Jadwal penelitian penulis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penentuan tempat dan judul Penelitian	■				
2	Pengajuan judul	■	■			
3	Penulisan Bab I		■			
4	Penulisan Bab II			■		
5	Penulisan Bab III			■		
6	Bimbingan Penelitian	■	■	■	■	■
7	Pengambilan data					■
8	Pengolahan data dan penulisan Bab IV				■	■
9	Penulisan Bab V				■	■
10	Penyelesaian Penelitian					■

Sumber : Data diolah Sendiri (2018)